

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 salah satu tujuan pemerintah adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk kesejahteraan rakyat Indonesia bisa diwujudkan dengan menjalankan Pemerintahan yang sehat dan melakukan atau melaksanakan segala bentuk pembangunan di berbagai bidang.

Salah satu penunjang atas terlaksananya program pemerintah yang khususnya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat yaitu anggaran. Anggaran dapat diartikan sebagai suatu rencana pengeluaran dan penerimaan dalam periode 1 tahun. Anggaran juga dapat berfungsi sebagai alat pengendalian, perencanaan, pengkoordinasian, pemotivasian, dan penilaian kinerja. (Siregar, 2015: 27)

Supaya anggaran dapat dimanfaatkan dengan baik maka perlu suatu perencanaan awal yang baik juga untuk mendukung *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangannya perlu diselenggarakan secara terbuka, serta bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. (Sutedi, 2012: 106)

Gagalnya target dalam penyerapan anggaran mengakibatkan manfaatbelanja menjadi hilang, karena adanya dana yang dialokasikan ternyata tidak semua dapat dimanfaatkan. Maka dari itu ini merupakan topik yang menarik. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki negara dapat

optimal untuk membiayai program strategis, jika pengalokasian anggaran efisien. Sumber-sumber penerimaan yang terbatas mewajibkan pemerintah menyusun prioritas program dan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien. (Halim, 2014: 96)

Permasalahan penyerapan anggaran juga terjadi di sektor perencanaan pembangunan. Pembangunan merupakan usaha mewujudkan perubahan dan pertumbuhan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*). (Siagian, 2012: 4)

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang pengembangan dan penelitian dalam bentuk badan. Dalam menunjang keberhasilan dalam sector pembangunan dan penelitian, maka Bappelitbangda Kota Bekasi telah menerapkan pagu awal belanja langsung Bappelitbangda Kota Bekasi yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis seperti yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Bappelitbangda Kota Bekasi tahun 2018 sebesar Rp. 14.841.180.840,-

Belanja langsung pada Bappelitbangda Kota Bekasi terbagi menjadi 2 macam jenis, yaitu Belanja Langsung Urusan dan Belanja Langsung Urusan Penunjang. Berikut adalah rincian anggaran belanja langsung:

**Tabel 1 Alokasi Anggaran Bappelitbangda Kota Bekasi 2018**

<b>Belanja</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
Belanja Langsung Urusan Penunjang	Rp. 4.044.590.000,-	Rp. 3.453.166.136,-	85,38%
Belanja Langsung Urusan	Rp. 10.546.590.840,-	Rp. 6.069.566.238,-	57,55%
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b> <b>14.591.180.840,-</b>	<b>Rp.</b> <b>9.522.732.374,-</b>	<b>65,26%</b>

Dari pagu anggaran Belanja Langsung tersebut dilaksanakan untuk membiayai 11 program yang ada pada Bappelitabngda Kota Bekasi yang merupakan 6 program Belanja Langsung Urusan dan 5 program Belanja Langsung Urusan Penunjang. 11 program tersebut yaitu:

**Tabel 2. Realisasi Anggaran Belanja Langsung Urusan Bappelitbangda Kota Bekasi 2018**

<b>No.</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>	<b>Pagu (Rp.)</b>	<b>Realisasi (Rp.)</b>	<b>Persentase (%)</b>
1.	Perencanaan pembangunan daerah	4.964.210.000,-	2.667.621.000,-	53,74%
2.	Perencanaan pembangunan ekonomi	600.000.000,-	401.645.400,-	66,94%
3.	Perencanaan social budaya	748.750.840,-	586.978.000,-	74,80%

4.	Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1.653.245.000,-	1.078.015.000,-	65,21%
5.	Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	172.290.000,-	172.290.000,-	100%
6.	Pengembangan data dan informasi	2.372.095.000,-	1.162.704.500,-	49,02%
	<b>Jumlah</b>	<b>10.546.590.840,-</b>	<b>6.069.253.900,-</b>	<b>57,55%</b>

**Tabel 3 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Urusan Penunjang Bappelitbangda Kota Bekasi 2018**

No.	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1.	Pelayanan administrasi perkantoran	3.506.950.000,-	3.039.808.636,-	87%
2.	Peningkatan sarana dan prasaran apatur	280.000.000,-	184.728.500,-	66%
3.	Peningkatan disiplin aparatur	197.640.000,-	195.020.000,-	99%
4.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0,-	0,-	0%

5.	Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	60.000.000,-	33.609.000,-	56%
	<b>Jumlah</b>	<b>4.044.590.000,-</b>	<b>3.453.166.136,-</b>	<b>85,38%</b>

Beberapa table di atas menunjukkan bahwa Belanja Langsung pada Bappelitbangda Kota Bekasi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu belanja langsung urusan dan belanja langsung urusan penunjang. Berdasarkan data tersebut alokasi anggaran Belanja Langsung Bappelitbangda Kota Bekasi tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 14.591.180.840,- yang mencakup belanja langsung urusan sebesar Rp.10.546.590.840,- dan belanja langsung urusan penunjang sebesar Rp. 4.044.590.000,-

Kemudian capaian persentase Belanja Langsung Bappelitbangda Kota Bekasi tahun 2018 yaitu sebesar 65,26% , yang mencakup 57,55% capaian persentase Belanja Langsung Urusan dari 6 program yang dijalankan dan 85,38% capaian persentase Belanja Langsung Urusan Penunjang dari 5 program yang dijalankan pada Bappelitbangda Kota Bekasi tahun 2018.

Berdasarkan fenomena anggaran belanja langsung yang ada pada Bappelitbangda Kota Bekasi serta di lihat pencapaian realisasi dari beberapa program kegiatan yang dijalankan, maka dari fenomena ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian**

## **Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun 2018”**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang di atas, selanjutnya penulis merumuskan identifikasi masalah apa saja faktor-faktor pengaruh penyerapan anggaran belanja langsung tahun 2018 pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi yang masih terdapat indikasi-indikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya perencanaan awal sehingga terdapat beberapa program kegiatan yang pencapaiannya kurang maksimal.
2. Terdapat kurangnya pengalokasian anggaran sebagai alat untuk mengoptimalkan anggaran.
3. Belum optimalnya beberapa program kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang mendukung penyerapan anggaran belanja langsung pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi?
2. Apa saja faktor yang menghambat penyerapan anggaran belanja langsung pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian

Pengembangan Daerah Kota Bekasi?

3. Bagaimana upaya untuk meminimalisir hambatan dalam penyerapan anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penelitian di atas, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mendukung penyerapan anggaran belanja langsung pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menghambat penyerapan anggaran belanja langsung pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya untuk meminimalisir hambatan dalam penyerapan anggaran.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoretis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah ilmu pengetahuan bagi kita dalam keilmuan yang berkaitan dengan penyerapan anggaran.

2. Kegunaan Praktis

## 1. Bagi Peneliti

- a. Menambah wawasan bagi peneliti, dalam menerapkan hasil studi tentang faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi penyerapan anggaran dengan melakukan penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.
- b. Memenuhi salah satu syarat Sidang Usulan Proposal pada jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

## 2. Bagi Instansi

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi atau bahan masukan serta evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi yang berkaitan mengenai faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran.

## 3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi serta referensi bagi mahasiswa yang ingin menyusun penelitian selanjutnya ataupun yang ingin menindaklanjuti penelitian ini dengan mengambil penelitian yang sama.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Dalam kerangka pemikiran, penulis menggunakan konsep pemikiran segitiga terbalik, yang mengartikan konsep ini semakin

mengerucut dari Keuangan Negara, kemudian Anggaran hingga mengerucut kepada Penyerapan Anggaran.

Menurut Indra Bastian (Bastian, 2005) Keuangan Negara merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara yang dapat di nilai dengan uang, dalam tata cara penyelenggaraan pemerintah.

Salah satu penunjang atas terlaksananya program pemerintah yang khususnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yaitu anggaran. Menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2009) Anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja yang hendak di capai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

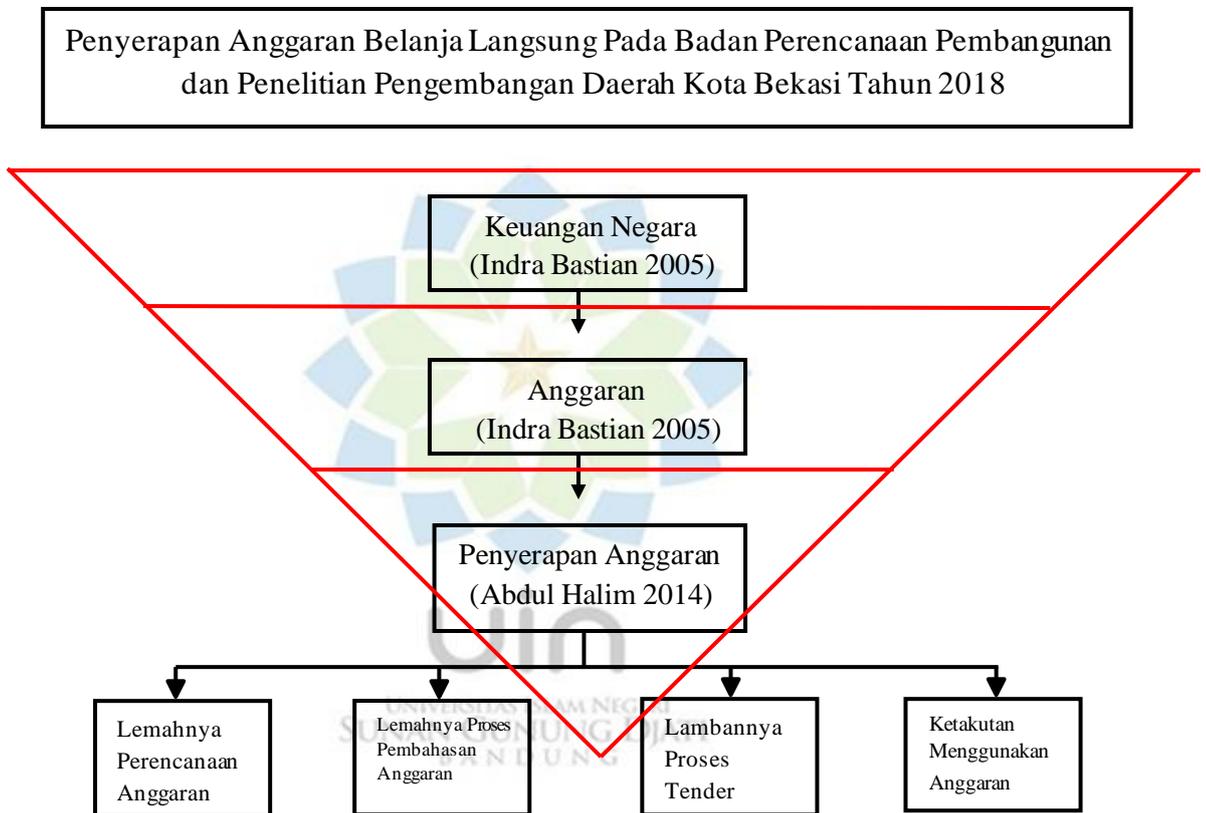
Sedangkan Abdul Halim (Halim, 2014) menyebutkan bahwa Penyerapan Anggaran dapat diartikan sebagai pencairan atau Realisasi Anggaran sesuai yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran pada saat tertentu. Gagalnya target dalam penyerpan anggaran mengakibatkan manfaat belanja menjadi hilang, karena adanya dana yang dialokasikan ternyata tidak semua dapat dimanfaatkan.

Ada beberapa dimensi yang terdapat dalam pengertian penyerapan anggaran menurut Abdul Halim tersebut yang berkaitan dengan permasalahan pada Bappelitbangda Kota Bekasi pada Tahun 2018. Yaitu diantaranya:

1. Lemahnya perencanaan anggaran
2. Lemahnya proses pembahasan anggaran
3. Lambannya proses tender, dan

#### 4. Ketakutan menggunakan anggaran

Dimensi-dimensi ini yang nantinya akan menjadi media ataupun landasan dalam menyelesaikan penelitian ini, serta menjadi solusi dan bahan evaluasi untuk permasalahan pokok khususnya.



**Gambar 1 Kerangka Pemikiran**

#### G. Proposisi

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah penulis gambarkan tersebut, maka proposisi penelitian ini yaitu: penyerapan anggaran belanja langsung pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi akan diukur berdasarkan factor-faktor

yang mempengaruhi penyerapan anggaran, yaitu: lemahnya perencanaan anggaran, lamanya proses pembahasan anggaran, lambannya proses tender, serta ketakutan menggunakan anggaran.

